
KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA DI AMERIKA SERIKAT DAN AUSTRALIA PADA RESONANSI GERAKAN *BLACK LIVES MATTER*

Shallum Marsha Maryam¹⁾, *Hendra Maujana Saragih²⁾

1), 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional Indonesia

*Email Korespondensi : hendramaujanasaragih@civitas.unas.ac.id

Diterima Redaksi: 10-07-2023 | Selesai Revisi: 09-08-2023 | Diterbitkan Online: 06-09-2023

Abstrak

Sejarah Amerika Serikat yang kurang lebih tiga abad penuh dengan konflik rasial antara orang kulit putih dan orang kulit hitam sangat kelam. Kasus yang terjadi terhadap orang kulit hitam bernama George Floyd sangat diperhatikan di Amerika Serikat dan bahkan di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang kulit hitam sering menjadi korban diskriminasi oleh orang kulit putih sendiri. Gerakan *Black Lives Matter* kembali menarik perhatian masyarakat internasional pada tahun 2020. Sekarang, gerakan yang bermula di Amerika Serikat telah sampai ke Australia. Australia sendiri memiliki sejarah panjang diskriminasi rasial terhadap orang Aborigin. Pemerintah Australia telah secara resmi meminta maaf atas kebijakan diskriminasi rasial di masa lalu dan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aborigin, tetapi kehidupan mereka masih jauh dari kesejahteraan.

Kata Kunci: *Black Lives Matter* , Hak Asasi Manusia, Kepedulian

Abstract

The history of the United States, which is more than three centuries full of racial conflicts between white people and black people, is very dark. The case of a black man named George Floyd received much attention in the United States and even around the world. This is due to the fact that black people are often victims of discrimination by white people themselves. The Black Lives Matter movement has returned to the attention of the international community in 2020. Now, the movement that started in the United States has made its way to Australia. Australia itself has a long history of racial discrimination against Aboriginal people. The Australian government has formally apologized for past policies of racial discrimination and made efforts to improve the welfare of Aboriginal people, but their lives are far from prosperous.

Keywords: *Black Lives Matter, Human rights, Caring*

PENDAHULUAN

Black Lives Matter adalah gerakan masyarakat yang bertujuan untuk melawan diskriminasi dan rasisme terhadap komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Banyak penelitian membahas masalah buta warna dan rasialisme terhadap orang kulit hitam, terutama di Amerika Serikat. Jurnal *#BlackLivesMatter: Gerakan Hak Sipil Generasi Ini*, yang ditulis oleh Tanika Siscoe dari Portland State University, melihat gerakan BLM berdasarkan sejarah ras di Amerika Serikat.

Black Lives Matter adalah gerakan sosial yang bertujuan untuk menggabungkan satu sama lain sebagai manusia. Gerakan *Black Lives Matter* telah berkembang menjadi organisasi yang mewakili lebih dari 30 kota di Amerika Serikat dan empat negara di luar Amerika Serikat sejak musim panas 2014. Selain itu, kampanye *Black Lives Matter* yang tersebar luas di Chicago, Illinois, New York City, dan Oakland, California, antara tahun 2014 dan 2016 menarik perhatian besar dari media AS (Amalia et al., 2021).

Black Lives Matter telah berkembang menjadi gerakan sosial yang populer di Amerika Serikat sejak 2013 dengan tujuan utama untuk mengutuk dan menghapus kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam dan rasisme sistemik di negara itu secara keseluruhan. Saat tagar *#BlackLivesMatter* menjadi viral di media sosial, gerakan ini mengumpulkan dukungan politik yang signifikan dan memperoleh visibilitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, di bawah pemerintahan Donald Trump (2017-2021), gerakan anti-rasis tidak diragukan lagi mengalami kesulitan. Pembunuhan George Floyd yang dilakukan oleh polisi kulit putih di Minneapolis pada 25 Mei 2020 adalah salah satu contohnya. Oleh karena itu, *Black Lives Matter* pada awalnya dapat dianggap sebagai platform untuk tuntutan politik bersama yang menjangkau batas negara dan melampaui batas.

Beberapa aspek yang membedakan *Black Lives Matter* sebagai gerakan transnasional telah ditemukan dalam analisis pertama: slogan-slogan yang berasal dari Amerika Serikat dan terkait dengan BLM menyebar ke banyak negara lain selama demonstrasi serentak, keinginan untuk gerakan transnasional ditunjukkan melalui

dukungan untuk penyebab dan pertemuan dengan aktivis di seluruh dunia, dan penyebaran berbagai aksi performatif, seperti berlutut atau mengadopsi slogan (Célestine et al., 2022).

Gerakan BLM muncul sebagai tanggapan atas kekerasan polisi dan berbasis pada keyakinan bahwa perilaku polisi Amerika diskriminatif, ditunjukkan oleh tingkat kekerasan dan kematian yang lebih tinggi di mana orang kulit hitam terlibat. Selain itu, orang-orang yang berasal dari ras minoritas percaya bahwa mereka dihukum secara tidak proporsional dan dihukum karena pelanggaran yang sama karena bias rasial hakim dan juri. Harus ditekankan bahwa hasil eksperimen mendukung pernyataan ini. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa polisi Amerika menggunakan tindakan yang berpotensi fatal sampai tiga kali lebih banyak terhadap orang kulit hitam dibandingkan dengan orang kulit putih.

Namun, dalam kenyataannya, ini adalah contoh kemajuan yang menghadapi fenomena yang telah terjadi berulang kali dalam sejarah Amerika, Contoh kemajuan ini dikenal sebagai "reaksi putih", yang berarti bahwa setiap kali ras minoritas di AS mencapai kemajuan, mereka harus menghadapi reaksi yang kuat dan berlawanan dari orang kulit putih yang mendukung gerakan ekstremis yang menentang persamaan ras dan mempromosikan Tindakan (Mosaffa & Nazifpour, 2021).

Black Lives Matter adalah gerakan sosial yang didirikan pada tahun 2013 sebagai tanggapan atas masalah diskriminasi rasial yang persisten di Amerika Serikat. *Black Lives Matter* muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai tindak kekerasan yang dialami oleh komunitas Afrika-Amerika di Amerika Serikat yang dilakukan oleh pejabat polisi.

Identitas dapat membantu orang bersatu, tetapi juga dapat menyebabkan kekerasan kultural, yang dapat berkembang menjadi kekerasan terbuka jika dibiarkan terus menerus. Pria Aborigin David Dungay meninggal di penjara Sydney pada tahun 2015, serupa dengan George Floyd. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Dungay, yang diwakili oleh pengacara keluarga, Dungay meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh empat anggota staf kepolisian. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kata-kata terakhir Dungay mirip dengan kata-kata Floyd, "aku tidak bisa bernapas."

Aksi demonstrasi *Black Lives Matter* sempat mengejutkan banyak orang Australia, termasuk elit politik. Selain itu, tindakan yang dilakukan di Australia tidak hanya

menunjukkan solidaritas, tetapi juga menunjukkan diskriminasi rasial yang telah terjadi di Australia selama bertahun-tahun. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa *Black Lives Matter* awalnya adalah gerakan untuk menuntut keadilan, tetapi dia kemudian sadar bahwa ada agenda politis di baliknya (Alexandra & Daniah, 2020).

Australia adalah salah satu negara yang memiliki masalah diskriminasi ras karena banyaknya imigran dari berbagai etnis. Oleh karena itu, pemerintah Australia meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) pada tahun 1975 dan menerapkannya di negara itu dengan membuat Undang-Undang Anti Diskriminasi Ras pada tahun 1975.

Dalam kasus ini, ada Komisi Diskriminasi Ras yang bekerja di bawah Undang-Undang Diskriminasi Ras (RDA), sesuai dengan alur mekanisme yang digambarkan di gambar 1. Strategi Nasional Anti Rasisme dibuat oleh Pemerintah Australia dan Komisi Diskriminasi Ahli Hak Asasi (AHRC) pada tahun 2011. Untuk menghasilkan strategi ini, Departemen Attorney-General, Kementerian Departemen Keluarga, Perumahan, Layanan Komunitas dan Urusan Masyarakat Adat, Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan, Kongres Nasional Penduduk Asli Australia, dan Dewan Federasi Komunitas Etnis Australia telah berkolaborasi dan memberikan masukan yang diperlukan (Dani & Muharjono, 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilaksanakan ini akan menggunakan suatu metode yang dinamakan dengan kualitatif ataupun dengan kata lain disebut sebagai naturalistik dikarenakan dilakukan dengan situasi yang tidak terindikasi hal lain atau disebut dengan alamiah. pada kondisi yang alamiah.

Penelitian kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian kualitatif, adalah jenis penelitian yang menghasilkan hasil yang tidak mungkin dicapai melalui teknik kuantitatif atau statistik lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk menyelidiki sejarah,

kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan,

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi konteks melalui penjelasan menyeluruh dan mendalam tentang kondisi dalam lingkungan yang alami (*natural setting*). Penelitian ini akan mengeksplorasi situasi aktual di lapangan studi. Selain itu, penelitian ini menggunakan paradigma Post-Positivistik sebagai landasan teoritikal.

Metode penelitian kualitatif ini muncul pada masa postpositivisme, yang ditandai dengan perubahan paradigma dalam persepsi fenomena atau realitas. Metode kuantitatif didasarkan pada filsafat humanistik dan fenomenologis. Metode kuantitatif bertentangan dengan pendekatan kualitatif positivisme. Sejarah menunjukkan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif telah muncul sebagai tanggapan atas kebutuhan untuk menjawab pertanyaan abadi tentang dunia (Nugrahani & Hum, 2014).

Sebagai evolusi dari Positivisme, postpositivisme memiliki karakteristik yang menonjol. Karena Positivisme memiliki banyak kelemahan, para pendukung Postpositivisme berusaha mengurangi dan mengubah kelemahan tersebut. Postpositivisme masih menargetkan prediksi dan kontrol. Menurut (Rijali, 2019), postpositivisme adalah kelompok yang berusaha memperbaiki kekurangan Positivisme yang hanya bergantung pada observasi. Postpositivisme adalah ideologi yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan Positivisme. Mereka berpendapat bahwa hukum alam benar-benar memungkinkan realitas untuk terjadi.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berinteraksi dengan sumber data, seperti yang ditunjukkan oleh teknik pengumpulan data seperti observasi dan wawancara mendalam. Dengan demikian, peneliti kualitatif harus mengenal orang yang memberikan data. Selain itu, metode penelitian kualitatif lebih interaktif saling mempengaruhi dalam melihat bagaimana variabel berinteraksi satu sama lain pada objek yang diteliti. Akibatnya, tidak ada yang tahu mana variabel inpeden dan dependennya (Rahardjo, 2011)

Tujuan penulis penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Amerika Serikat menangani kasus diskriminasi rasial, seperti Black Lives Matter, sebagai upaya

memerangi rasisme, karena pendekatan kualitatif memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam untuk mengatasi masalah penelitian mereka. Diskusi ini diharapkan dapat membantu mengakhiri diskriminasi, mendorong toleransi, dan menciptakan keharmonisan di antara para imigran dari berbagai negara, seiring dengan pencabutan Kebijakan Australia Putih dan pembatasan imigrasi lainnya yang diganti oleh kebijakan multikulturalisme di Australia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat pada resonansi Gerakan *Black Lives Matter*

Dalam sejarah rasisme Amerika Serikat, banyak kasus pelanggaran rasial telah terjadi. Sejarah rasisme di Amerika Serikat mencatat beberapa kasus pelanggaran rasial yang dilakukan oleh polisi, selain kasus rasisme yang terjadi di masyarakat. Di Amerika Serikat, kasus rasisme berulang telah berdampak pada kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, terutama perlakuan diskriminatif antara warga kulit hitam dan warga kulit putih.

Rasisme adalah cara berpikir tentang kelompok yang berbeda dalam masyarakat Amerika Serikat. Memberikan label kepada kelompok minoritas dan mendiskriminasi mereka secara sosial menunjukkan sikap rasis ini. Sifat dan perilaku rasis sendiri dapat menyebabkan reaksi emosional yang sangat kuat, terutama bagi mereka yang telah mengalami penindasan dan eksploitasi sebagai akibat dari sikap dan perilaku tersebut di Amerika Serikat.

Kasus kematian George Floyd pada 25 Mei 2020 lalu menjadi salah satu potret buram panjang dalam sejarah rasisme di Amerika Serikat yang berakhir tragis. Dia telah menjadi figur utama dalam demonstrasi menuntut kesetaraan dan keadilan bagi warga Afrika-Amerika dan tercatat sebagai aksi protes menentang rasisme terbesar sejak tahun 1960-an (Banda, 2020).

Meskipun hukum internasional mengenai hak asasi manusia menjamin hak semua orang di seluruh negara, standar HAM seringkali tidak dapat diterapkan di Amerika Serikat, sehingga perlu dilaksanakan melalui hukum lokal, negara bagian, atau federal.

Sementara pengadilan internasional dan badan pengawas biasanya tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung menegakkan keputusan mereka di Amerika Serikat, perjanjian internasional mencakup definisi umum hak-hak tersebut. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan penerapan hak-hak di Amerika Serikat adalah dengan memperkuat perlindungan hukum domestik dengan menetapkan undang-undang yang mengakui keberadaan hak-hak tersebut dan memastikan bahwa hak-hak tersebut diterapkan oleh pemerintah dan pengadilan AS konsensional. (Kamal et al., n.d.)

Amerika Serikat berdiri atas demokrasi, dan salah satu dasar demokrasi yang paling dihargai oleh negara itu adalah semangat kebebasan, kebebasan berpendapat, dan gagasan bahwa rakyat mengatur pemerintahan. Amerika Serikat bukan hanya salah satu negara yang paling awal mengadopsi demokrasi, tetapi juga salah satu negara yang terus menjadikan demokrasi sebagai salah satu kebijakan luar negerinya yang paling penting sejak Perang Dingin II (Malik & Darmawan, 2017).

Upaya Amerika Serikat untuk menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia, membangun tatanan internasional baru yang mendukung demokrasi, dan mempertahankan demokrasi dalam bentuk apa pun yang terlihat dalam kebijakan luar negerinya. Sebelum PD II, Presiden Truman mengumumkan Marshall Plan untuk membantu sekutu Eropa mempertahankan demokrasi dan memperkuat ekonomi (Beetham, 1999).

Karena mereka memiliki nilai yang sama, Amerika Serikat mendukung demokrasi global. Mereka juga percaya bahwa demokrasi yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat dapat menyelesaikan masalah yang telah terjadi sebelumnya. Menurut teori perdamaian demokratis, negara-negara demokratis cenderung menghindari perang (Lynn-Jones, 1998).

Menurut teori perdamaian demokrasi, penyebaran demokrasi ke seluruh dunia akan dikaitkan dengan kepentingan Amerika di berbagai wilayah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penerapan demokrasi dianggap menempatkan keamanan dan kebebasan warga negara Amerika di bawah bahaya. Ini karena negara-negara yang menganut sistem demokrasi dianggap lebih dapat diandalkan dan dianggap sebagai rekan Amerika di kancah internasional, dengan kemungkinan yang lebih kecil bahwa mereka akan saling

berperang. Akibatnya, Amerika harus terus menyebarkan demokrasi ke seluruh dunia (Weber, 2018).

Hak asasi manusia seperti kebebasan tidak dapat dipisahkan dari demokrasi, jadi penting untuk mendukung dan melindungi hak asasi ini. Amerika Serikat menyadari bahwa demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan tidak dapat diterapkan secara eksklusif dalam kebijakan luar negeri namun, merupakan kesalahan bagi Amerika Serikat untuk menyimpang dari kepentingan nasionalnya. Pemerintahan Amerika mengajak pemerintahan untuk melaksanakan hak asasi sesuai dengan komitmen dan kewajiban mereka untuk melindungi hak asasi manusia. (Schnitzer, 2019)

Selain itu, pemerintah Amerika membiayai agenda sosial masyarakat yang mendukung kebebasan berpendapat, berkumpul, dan hak asasi anak. Agenda ini bertujuan untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak buruh, menghentikan kekerasan berbasis gender, mengurangi diskriminasi terhadap perempuan, membantu masyarakat adat mendapatkan akses yang lebih baik ke keadilan, dan mengawasi penegakan hak asasi manusia oleh polisi lokal (Rice, 2000).

Selain itu, Amerika Serikat berpartisipasi dalam upaya internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. membuat kebijakan internasional yang menghormati hak asasi manusia dan membentuk dan membiayai organisasi internasional yang relevan. Amerika Serikat mempromosikan keamanan dan hak asasi manusia setelah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Majelis Umum PBB mengadopsi Universal Declaration of Human Rights pada tahun 1948, yang membahas hak asasi manusia dan kebebasan (McMahon, 2009).

Amerika Serikat didirikan untuk melindungi hak asasi manusia lebih dari dua abad yang lalu. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, telah menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak saat itu. Demokrasi adalah satu-satunya kepentingan nasional yang dapat mengamankan kepentingan lain; dengan mendukungnya, Amerika Serikat tidak hanya mempertahankan hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan hak-hak pekerja, tetapi juga membangun dunia yang lebih aman, stabil, dan sejahtera di mana Amerika Serikat dapat memajukan kepentingannya sendiri (Beetham, 1999)

Rasisme dan militerisme membentuk fondasi ekonomi Amerika. Kompleks militer-industri-karseral sangat sulit untuk diurai karena banyak industri yang bergantung padanya, seperti industri gas, minyak, dan ekstraktif, think tank, universitas, pelobi, Kongres, dan jumlah pekerjaan yang didukungnya. Kekayaan rasial dan ketimpangan pendapatan, sistem pajak regresif, dan efek negatif uang pada politik mempertahankan keadaan saat ini.

Ekonomi Amerika digerakkan oleh militerisme dan rasisme. Kompleks militer-industri-karseral sangat sulit untuk diuraikan karena kuantitas dan kualitas pekerjaan yang didukungnya, keuntungan perusahaan yang dihasilkannya, dan jumlah industri yang bergantung padanya, seperti sektor minyak dan gas. Kecanduan Amerika pada perang dan rasisme anti-Kulit Hitam berasal dari banyak mitos dasar

Diskriminasi rasial terhadap penindasan kaum berkulit hitam juga menjadi perhatian Amerika Serikat. Patrisse Khan-Cullors, Alicia Garza, dan Opal Tometi, tiga penyelenggara komunitas kulit hitam, memulai Gerakan BLM sebagai salah satu gerakan online dengan tagar #BlackLivesMatter di media sosial. (Elizabeth, 2015) Setelah pembunuhan dua pria kulit hitam yang tidak bersenjata, Eric Garner dan Michael Brown, yang dilakukan oleh polisi pada tahun 2014, gerakan BLM muncul. Black Lives Matter tidak pernah berfungsi sebagai gerakan hak asasi manusia selain gerakan hak sipil.

Selain itu, *Montgomery Improvement Association* (MIA), yang didirikan oleh Martin Luther King, Jr., melakukan upaya untuk mendukung hak kulit hitam dan mendorong perhatian nasional terhadap segregasi ras. Banyak gerakan anti-rasisme yang mendukung komunitas kulit hitam sebagai tanggapan terhadap masalah rasisme di Amerika Serikat yang telah ada sejak era kolonisasi.

Tiga artis kulit hitam Alicia Garza, Patrisse Cullors, dan Opal Tometi telah bergabung dengan Gerakan Black Lives Matter (BLM) sejak pembunuhan remaja 17 tahun Trayvon Martin yang dilakukan oleh George Zimmerman pada tahun 2013. (*Black Lives Matter, Black Lives Matter*, n.d.) Pada 7 November 2020, Presiden Joe Biden menyatakan bahwa pemerintahannya akan "mengembalikan jiwa Amerika", mengatakan bahwa pemilih AS telah memberinya mandat "untuk mencapai keadilan rasial dan membasmi rasisme sistemik di negara ini."

Selain itu, dia menyatakan bahwa dia bermaksud menggunakan kepemimpinan moral negara yang dipulihkan untuk membangun konsensus internasional seputar nilai-nilai Amerika dan mendorong negara-negara asing dan lembaga antarpemerintah untuk mengadopsi agenda (Stevens, 2020).

Upaya kebijakan Australia dalam Resonansi Black Lives Matter untuk melindungi Hak Asasi Manusia terhadap Kaum Aborigin

Komisi Hak Asasi Manusia Australia (AHRC) menyelidiki dan menangani keluhan yang melanggar hukum tentang diskriminasi seksual, ras, disabilitas, dan usia. Diskriminasi seksual dapat mencakup selain pelecehan seksual, diskriminasi karena kehamilan, menyusui, tanggung jawab keluarga, identitas gender, status interseks, dan orientasi seksual. Selain itu, diskriminasi disabilitas termasuk diskriminasi karena cacat fisik, intelektual, sensorik, pembelajaran, atau penyakit kejiwaan.

Tidak diragukan lagi, AHRC bergantung pada banyak hal, mulai dari sejarah, pemerintahan, hingga perselisihan dalam masyarakat dan pemerintah Australia. Perlu diingat bahwa tradisi demokrasi liberal membentuk struktur pemerintahan Australia. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip Australia, seperti toleransi beragama, kebebasan berbicara dan berserikat, supremasi hukum, dan institusi pemerintahannya, yang mirip dengan nilai-nilai di Inggris dan Amerika Serikat.

Dimulai dengan sejarah awal Hak Asasi Manusia di Australia, Organisasi Hak Asasi Manusia Australia (AHRC) didirikan pada tahun 1986 dan mengalami kemajuan dan stagnasi. Namun, setelah kebijakan putih Australia dihapus dan Strategi Nasional Australia terkait persamaan ras muncul, Organisasi ini mengalami kemajuan yang signifikan.

Sebanyak 396 keluhan diterima sepanjang tahun 2015-2016, dan AHRC berhasil menyelesaikan semua keluhan sampai pada tahap yang beragam. 70% atau 268 keluhan telah diselesaikan dengan cara berdamai. Kemudian, 8% atau 29 keluhan dihentikan, 13% atau 55 keluhan diakhiri karena tidak dapat mencapai konsiliasi, 8% atau 29 keluhan lainnya ditarik dari penyelesaian, dan 1% atau 15 keluhan diakhiri dengan alasan tertentu.

Selanjutnya, pemerintah Australia membentuk *Australian Human Rights Commission* (AHRC), lembaga nasional pemerintah untuk menangani kasus pelanggaran

Hak Asasi Manusia di Australia. Menurut aturan *Australian Human Rights Commission Act 1986*, AHRC memiliki prosedur tugas kerja. Pada prinsipnya, UNHRC adalah organisasi sekaligus rezim; di Australia, dasar pelaksanaannya diadopsi dalam bentuk AHRC. Namun, aturan dan prosedur yang digunakan UNHRC untuk memerangi atau menghentikan diskriminasi ras tidak jauh berbeda. (AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION AHRC)2015-2018 Micaella Dani Social FISIP UPN “Veteran”

Masyarakat suku Aborigin melihat pidato permintaan maaf Kevin Rudd sebagai hasil dari perjuangan panjang mereka untuk hak asasi kepada pemerintah Australia. Masyarakat suku Aborigin mengaku terharu ketika mendengar pidato permintaan maaf Kevin Rudd. Di sisi lain, masyarakat suku Aborigin tentu saja tidak berpuas diri hanya dengan permintaan maaf. Permintaan maaf hanyalah awal bagi para aktivis dan pejuang hak asasi manusia dari masyarakat Aborigin.

Komisi Hak Asasi Manusia Australia memulai program yang disebut *Close The Gap* untuk mendorong emansipasi bagi masyarakat Aborigin. Program ini berusaha mencapai beberapa tujuan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aborigin, seperti lapangan kerja, akses ke pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung, dan angka harapan hidup untuk bayi dan balita.

Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan pada tahun 2019 bahwa, selama sebelas tahun setelah permintaan maaf Kevin Rudd, pemerintah Australia gagal memenuhi hak dan upaya emansipasi masyarakat suku Aborigin. Morrison kemudian menyatakan bahwa ia akan mengikuti janji Julia Gillard dan Tony Abbott untuk mengakui hak-hak masyarakat suku Aborigin, termasuk hak konstitusional mereka, dalam konstitusi (Alexandra & Daniah, 2020).

KESIMPULAN

Sejarah diskriminasi ras di Amerika Serikat telah menunjukkan berbagai insiden yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta terkait dengan gerakan #BlackLivesMatter yang berjuang untuk keadilan dan kebebasan dari rasisme terhadap orang kulit hitam. Dalam konteks ini, sistem hukum Amerika Serikat terbukti belum mampu mengatasi permasalahan diskriminasi. Contohnya, kejadian penembakan Trayvon

Martin oleh seorang relawan pada tahun 2012 menyulut kemarahan publik dan menjadi titik awal eskalasi kekerasan antara polisi dan komunitas kulit hitam di Amerika Serikat, yang akhirnya mendorong lahirnya gerakan Black Lives Matter.

Gerakan ini mengadvokasi perubahan dalam hukum pidana untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan perlindungan hukum. Pengaruh gerakan ini pun berhasil merambah ke tingkat nasional dan bahkan internasional, mengubah pandangan terhadap isu-isu yang diusungnya. Tujuan utama gerakan ini adalah mengubah sistem secara sistematis di negara tersebut dengan harapan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif bagi kelompok yang terpinggirkan. Hal ini diupayakan melalui langkah-langkah politik yang seringkali menimbulkan kontroversi.

Di sisi lain, walaupun pemerintah Australia telah secara resmi meminta maaf kepada masyarakat suku Aborigin atas kebijakan-kebijakan masa lalu yang merugikan mereka dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kebijakan baru, kenyataannya suku Aborigin masih memerlukan perhatian yang lebih intensif dari pemerintah dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, peluang kerja, dan isu-isu sosial yang tidak adil.

REFERENSI

- Alexandra, F., & Daniah, R. (2020). RESONANSI BLACK LIVES MATTER DI AUSTRALIA. *Interdependence Journal of International Studies*, 1(2).
- Amalia, A., Ridwan, L. A., Ayu, R. K., & Lian, S. (2021). Black Lives Matter in the United States. *Sociae Polites*, 22(2), 101–115.
- Banda, O. (2020). Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2).
- Beetham, D. (1999). *Democracy and human rights* (Vol. 249). Polity Press Cambridge.
- Célestine, A., Martin-Breteau, N., & Recoquillon, C. (2022). Introduction-Black Lives Matter: a transnational movement? *Esclavages & Post-Esclavages. Slaveries & Post-Slaveries*, 6.
- Dani, M., & Muharjono, M. (2021). AUSTRALIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION (AHRC) DALAM MENGURANGI KASUS DISKRIMINASI RAS DI

- AUSTRALIA TAHUN 2015-2018. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 24(1), 434–462.
- Lynn-Jones, S. M. (1998). *Why the United States should spread democracy*. Belfer Center for Science and International Affairs, John F. Kennedy School
- Malik, A. K., & Darmawan, W. (2017). Rekam Jejak Malcolm X Dalam Penegakan Hak Sipil Orang Kulit Hitam Amerika Serikat 1957-1965. *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 6(2).
- McMahon, R. (2009). Human rights reporting and US foreign policy. *Council on Foreign Relations*.
- Mosaffa, N., & Nazifpour, A. (2021). The Effects of the " Black Lives Matter" Movement on the International Approach of the US Government to Human Rights. *Hum. Rts.*, 16, 51.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Rice, C. (2000). Promoting the national interest. *Foreign Aff.*, 79, 45.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.
- Stevens, M. (2020). Read Joe Biden’s president-elect acceptance speech: full transcript. *New York Times*, 9.
- Weber, M. A. (2018). *Global Trends in Democracy: Background, US Policy, and Issues for Congress*. Congressional Research Service.